

NASKAH ORISINAL

Penerapan Prinsip Rumah Sehat Sebagai Dasar Intervensi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya

Adinda Sih Pinasti Retno Utami* | Purwanita Setijanti | Sarah Cahyadini | Dewi Septanti | Wahyu Setyawan | Tanti Satrianan Rosary Nasution | Zuhrotul Mawaddatil Ula | Tisya Surya Narida | Adista Ismi Oktavia

Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Korespondensi

*Adinda Sih Pinasti Retno Utami,
Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.
Alamat e-mail: dinda.sih@arch.its.ac.id

Alamat

Laboratorium Perumahan dan Permukiman,
Departemen Arsitektur, Kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia.

Abstrak

Permukiman swadaya memiliki peran penting dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan. Namun, keterbatasan sumber daya dan pengetahuan teknis menyebabkan munculnya rumah tidak layak huni (RTLH) yang berpotensi menurunkan kualitas hidup. Sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggal di rumah milik sendiri yang dibangun secara swadaya dan tidak selalu memenuhi standar rumah sehat terutama yang layak dan mendukung produktivitas. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko seperti pencahayaan dan penghawaan yang buruk, lantai yang licin, yang berakibat pada kurang amannya hunian untuk mendukung keseharian lansia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan rancangan hunian layak huni bagi warga Kelurahan Ngagel yang sudah terdaftar dalam calon penerima bantuan program Dandan Omah. Program oleh Pemerintah Kota Surabaya ini bertujuan untuk mengurangi angka RTLH di Kota Surabaya. Hasil dari kegiatan berupa rancangan perbaikan RTLH dengan penerapan prinsip rumah sehat ramah lansia yang sudah disesuaikan dengan anggaran pemerintah. Kegiatan ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 11 tentang kota dan permukiman berkelanjutan.

Kata Kunci:

Perbaikan Rumah, Rumah Sehat, Kota dan Permukiman Berkelanjutan.

1 | PENDAHULUAN

1.1 | Latar Belakang

Permukiman swadaya di kawasan perkotaan memiliki peran strategis dalam menyediakan hunian bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam situasi keterbatasan akses terhadap perumahan formal, masyarakat secara mandiri membangun permukiman sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan tempat tinggal^[1]. Namun, pembangunan secara swadaya juga kerap

berarti terbatasnya sumber daya dan pengetahuan teknis sebab dibangun sesuai dengan kemampuan masyarakat, yang seringkali berdampak pada kualitas hunian^[2].

Akibatnya, tidak sedikit dari hunian ini yang berada dalam kondisi tidak layak huni. Berdasarkan data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Surabaya tahun 2023, masih terdapat 5.871-unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Surabaya (Gambar 1)^[3]. Kondisi ini semakin kompleks mengingat keterbatasan kemampuan finansial masyarakat dalam melakukan perbaikan secara mandiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 136.370 ribu jiwa warga Surabaya hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2023, yang berarti tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memperbaiki kondisi hunian mereka^[4].

Selain keterbatasan ekonomi, penambahan jumlah lansia di Indonesia merupakan fenomena demografis yang tidak dapat dihindari. Berdasarkan data BPS, Indonesia tengah menghadapi pergeseran demografis dan *ageing population* dengan populasi lansia yang saat ini mencapai 11,75%, dan diproyeksikan akan terus meningkat^[5]. Dalam konteks ini, isu tentang kualitas lingkungan hunian menjadi krusial, khususnya bagi kelompok lanjut usia yang secara fisik mengalami penurunan fungsi tubuh dan memiliki risiko tinggi terhadap kecelakaan domestik. Sayangnya, Sebagian besar lansia di Indonesia tinggal di perumahan swadaya yang dibangun secara bertahap tanpa standar kesehatan dan keselamatan yang memadai.

Pemberdayaan perumahan swadaya melalui peningkatan kualitas hunian menjadi tantangan yang dihadapi di berbagai wilayah di Indonesia, diantaranya Kelurahan Ngagel, Surabaya. Terdapat setidaknya 10 rumah yang termasuk dalam klasifikasi RTLH di Kelurahan Ngagel, yakni 2 rumah di RW 01, 3 rumah di RW 02, 4 rumah di RW 03, serta 1 rumah di RW 05. Kondisi hunian yang tidak memenuhi persyaratan dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat, karena tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga berisiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan yang dapat merugikan kesejahteraan mereka.

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk melakukan perbaikan rumah menjadi tantangan dalam peningkatan kualitas perumahan swadaya, sehingga diperlukan intervensi dari berbagai pihak. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengimplementasikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui Peraturan Kementerian PUPR Nomor 07/PRT/M/2018^[6]. Selain itu, Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang diatur dalam Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2022 dan diperbarui melalui Perwali No. 35 Tahun 2022 dan No. 7 Tahun 2024. Program-program ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka dapat meningkatkan kualitas rumah mereka secara mandiri, dengan bantuan dana dan pendampingan teknis.

Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada perancangan hunian yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kontekstual dengan kondisi lingkungan setempat, serta memiliki tingkat kompleksitas yang sesuai dengan keterbatasan sumber daya dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat.

1.2 | Solusi Permasalahan atau Strategi Kegiatan

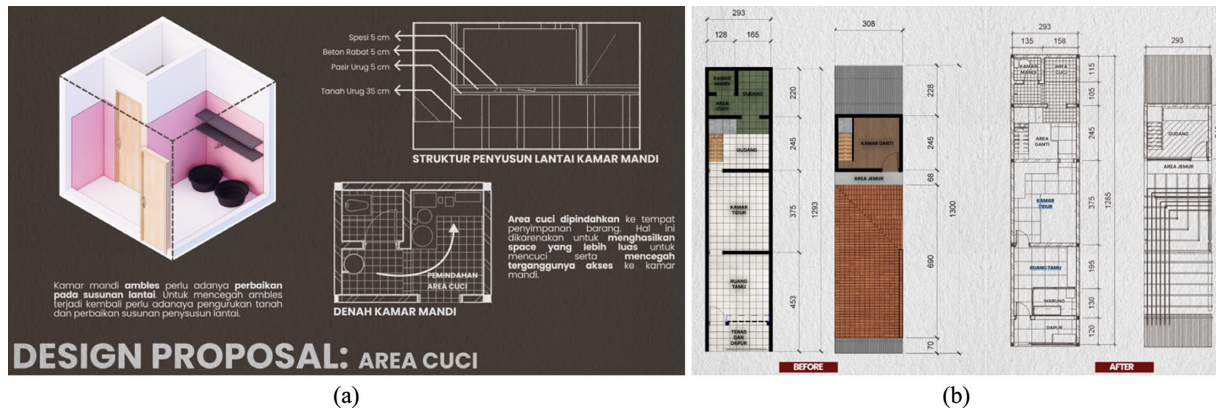
Berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan mengenai rumah tidak layak huni terkhususnya untuk lansia di Kelurahan Ngagel:

1. Pengidentifikasian masalah dan kebutuhan hunian berdasarkan observasi lapangan, data dari pemerintah serta wawancara dengan pemilik rumah. Langkah ini untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai kondisi eksisting hunian serta kendala yang dihadapi masyarakat secara langsung. Proses identifikasi ini akan melibatkan mahasiswa arsitektur. Melalui survei lapangan ini, mahasiswa akan mengidentifikasi berbagai permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kerusakan struktur bangunan, kurangnya ventilasi yang memadai, serta masalah sanitasi. Selain itu, mahasiswa juga akan menganalisis aspek sosial dan ekonomi masyarakat, guna memastikan desain yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan kebutuhan fisik, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan rumah mereka secara swadaya.
2. Merumuskan solusi berupa desain perbaikan rumah yang layak dan sehat melalui proses perancangan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pendampingan akademisi dan validasi dari pemerintah agar sesuai dengan kebijakan dan kapasitas program bantuan. Proses perancangan dilakukan secara iteratif guna memastikan bahwa desain akhir tidak hanya memenuhi aspek teknis, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan sumber daya lokal yang terjangkau.

3. Penyerahan hasil rancangan kepada perangkat Kelurahan Ngagel.

1.3 | Target Luaran

Target luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah rancangan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni sesuai dengan prinsip rumah sehat untuk menunjang penghidupan penghuninya. Berikut visualisasi luaran yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Desain proposal; (a) Konsep perbaikan; (b) Denah rancangan sesuai dengan prinsip rumah sehat

2 | TINJAUAN PUSTAKA

2.1 | Hak Atas Hunian yang Layak

Hak atas hunian layak (*the right to adequate housing*) bukan hanya soal memiliki rumah, tetapi mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang memungkinkan seseorang tinggal secara aman dan bermartabat^[7]. Konsep ini menekankan bahwa tempat tinggal harus menyediakan rasa aman, kenyamanan fisik, perlindungan hukum, serta memungkinkan partisipasi sosial dan ekonomi yang sehat. Hal ini diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Pasal 11). Dalam kerangka ini, negara tidak sekadar menyediakan rumah, melainkan membentuk sistem yang memungkinkan warganya mengakses tempat tinggal yang memadai. UN-Habitat merumuskan tujuh kriteria utama yang harus dipenuhi agar sebuah hunian dianggap layak, yaitu: keamanan status tinggal, ketersediaan layanan infrastruktur, keterjangkauan, kelayakan fisik hunian, aksesibilitas, lokasi, dan kecukupan budaya berhuni^[8].

2.2 | Kriteria Rumah Layak Huni

Kriteria rumah layak huni pada dasarnya hampir sama di setiap negara, hanya dengan iklim dan kondisi geografi yang berbeda-beda, hal teknis rumah layak huni menjadi berbeda pula. Untuk Indonesia, kriteria dan syarat rumah layak huni diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018^[9]. Kriteria rumah layak huni (buku 01 rumah Layak Huni Kementerian PUPR) dibagi menjadi dua bagian yaitu kondisi rumah yang layak dan kondisi lingkungan yang layak^[10].

- **Kondisi Rumah**

Kondisi rumah yang layak huni yaitu: (1) luas bangunan cukup untuk sehari-hari, (2) memperoleh akses air bersih, terdapat akses MCK, (3) memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara, (4) memiliki pembagian ruangan yang baik, (5) lantai dari beton atau keramik.

- **Kondisi Lingkungan**

Kondisi Lingkungan yang layak yaitu (1) sarana dan prasarana memenuhi kebutuhan warga, (2) saluran pembuangan air

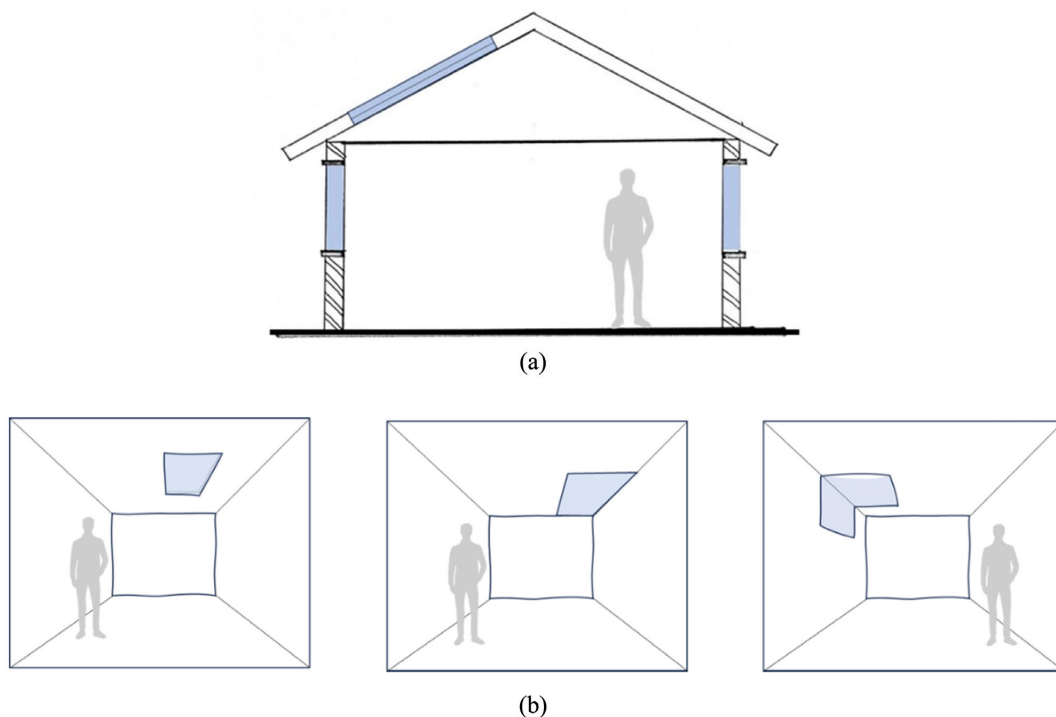
memenuhi standar, (3) tidak dekat TPS, (4) tidak dekat pabrik dengan polusi air, tanah, udara berbahaya, (5) tidak rawan longsor, (6) serta rumah tidak berada di pinggiran atau di atas kali, danau atau saluran pembuangan.

Salah satu poin penting yang sering terlewat adalah pencahayaan dan penghawaan yang baik. Pencahayaan memiliki peranan yang esensial dalam mendukung berbagai aktivitas manusia, khususnya aktivitas yang dilakukan di dalam ruang karena berkaitan langsung dengan kesehatan visual^[11]. Pencahayaan alami dari sinar matahari dapat dioptimalkan melalui keberadaan bukaan pada bangunan yang proporsinya ideal, yakni sekitar 15 hingga 20 persen dari luas lantai ruangan. Selain itu, efektivitas pencahayaan alami akan lebih maksimal apabila bukaan tersebut tidak terhalang oleh bangunan lain di sekitarnya, sehingga memungkinkan sinar matahari masuk secara langsung ke dalam ruang. Dengan demikian, penggunaan pencahayaan alami pada siang hari sangat memungkinkan untuk diterapkan.

Kualitas udara dalam ruang merupakan salah satu faktor penentu tingkat kenyamanan penghuni di dalam bangunan tempat tinggal. Sirkulasi atau pertukaran udara yang berlangsung secara teratur melalui ruang-ruang dan bukaan pada dinding maupun partisi yang berfungsi sebagai ventilasi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kenyamanan dan kesehatan lingkungan hunian^[12]. Penerapan sistem ventilasi silang menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Ventilasi silang dapat diterapkan untuk:

1. Menghasilkan kesegaran udara dalam ruangan dengan cara penghawaan alami.
2. Volume udara yang mengalir masuk ruangan sama dengan volume udara yang mengalir keluar ruangan.
3. Tidak ada asap dapur atau bau kamar mandi/WC yang masuk.

Namun, mengingat kondisi permukiman di kawasan kampung perkotaan yang umumnya memiliki kepadatan bangunan tinggi dan rumah-rumah berdempetan, diperlukan strategi perancangan yang inovatif guna tetap memenuhi standar kesehatan lingkungan hunian. Terbatasnya dinding yang dapat difungsikan sebagai bukaan menuntut adanya alternatif lain, seperti penambahan bukaan pada bagian atap bangunan (gambar 2a). Penempatan bukaan di atap tersebut perlu dirancang secara cermat dengan mempertimbangkan intensitas aktivitas di ruang di bawahnya, mengingat intensitas sinar matahari di Surabaya yang cukup tinggi, sehingga bukaan yang terlalu besar berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi penghuni (gambar 2b).



Gambar 2 Peletakan Konsep Bukaan; (a) Diletakkan di Sisi Dinding dan Atap Rumah (kiri); (b) Diletakkan di Atap Rumah

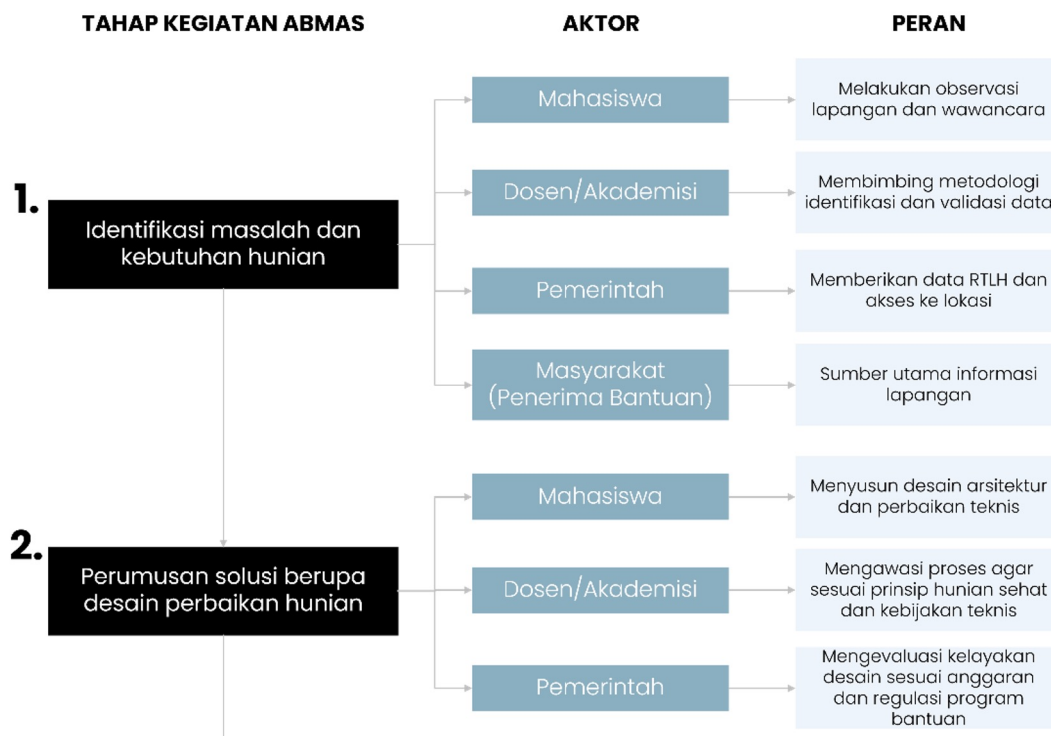
2.3 | Regulasi dan Bantuan Pemerintah

Bantuan Stimulus Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis kelayakan hunian di perkotaan dan pedesaan. Program ini dikelola oleh Kementerian PUPR sejak 2006 dan bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memperbaiki atau membangun rumah secara mandiri^[13]. Program ini juga direplika di beberapa kota yang memiliki kecukupan anggaran untuk melaksanakan program serupa, seperti Dandan Omah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya^[14].

Berdasarkan sintesis antara konsep hak atas hunian yang layak menurut UN-Habitat dan kriteria rumah layak huni yang berlaku di Indonesia, analisis kondisi eksisting dalam kajian ini difokuskan pada delapan aspek utama, yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas bangunan, sanitasi, akses terhadap air minum, pencahayaan alami, penghawaan atau ventilasi, keamanan bangunan, serta kesesuaian lokasi hunian. Delapan aspek tersebut dipilih karena mewakili indikator-indikator yang paling relevan dalam menilai kualitas fisik dan kesehatan lingkungan hunian, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan utama pada rumah swadaya di Kelurahan Ngagel sebagai landasan penyusunan usulan perbaikan.

3 | METODE KEGIATAN

Untuk mendukung keberhasilan strategi kegiatan, aktor yang terlibat mencakup tim pengabdian (dosen dan mahasiswa), pemerintah, serta masyarakat, menjalankan peran masing-masing dalam setiap tahap kegiatan. Tahapan ini dimulai dari identifikasi masalah dan kebutuhan hunian hingga perumusan solusi berupa rancangan perbaikan hunian. Berikut merupakan gambaran metode kegiatan, aktor dan peran yang dilakukan (gambar 3).



Gambar 3 Tahapan Kegiatan dan Peran Anggota Abmas

4 | HASIL DAN DISKUSI

Terdapat sepuluh rumah tidak layak huni telah masuk skala prioritas Kelurahan Ngagel, yakni 2 rumah di RW 01, 3 rumah di RW 02, 4 rumah di RW 03, serta 1 rumah di RW 05. Kondisi hunian yang tidak memenuhi persyaratan dapat berdampak pada kualitas hidup masyarakat, karena tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga berisiko menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan yang dapat merugikan kesejahteraan mereka.

Ketika pengabdian berjalan, dua rumah telah dalam tahap pembangunan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya, sehingga tim melaksanakan survei untuk delapan rumah lainnya.

4.1 | Survei Hunian Eksisting

Pelaksanaan survei awal, tim didampingi oleh pihak kelurahan untuk memperkenalkan tim pengabdian kepada warga penghuni rumah, seperti terlihat pada Gambar 4. Dalam tahap ini, tim mengunjungi delapan rumah yang menjadi prioritas kerja rumah layak huni. Setelah perkenalan awal ini, tim pengabdian dibagi ke dalam delapan kelompok supaya dapat fokus ke masing-masing rumah. Untuk selanjutnya, setiap kelompok akan melakukan survei secara mandiri ke rumah-rumah tersebut.



Gambar 4 Pelaksanaan Survei

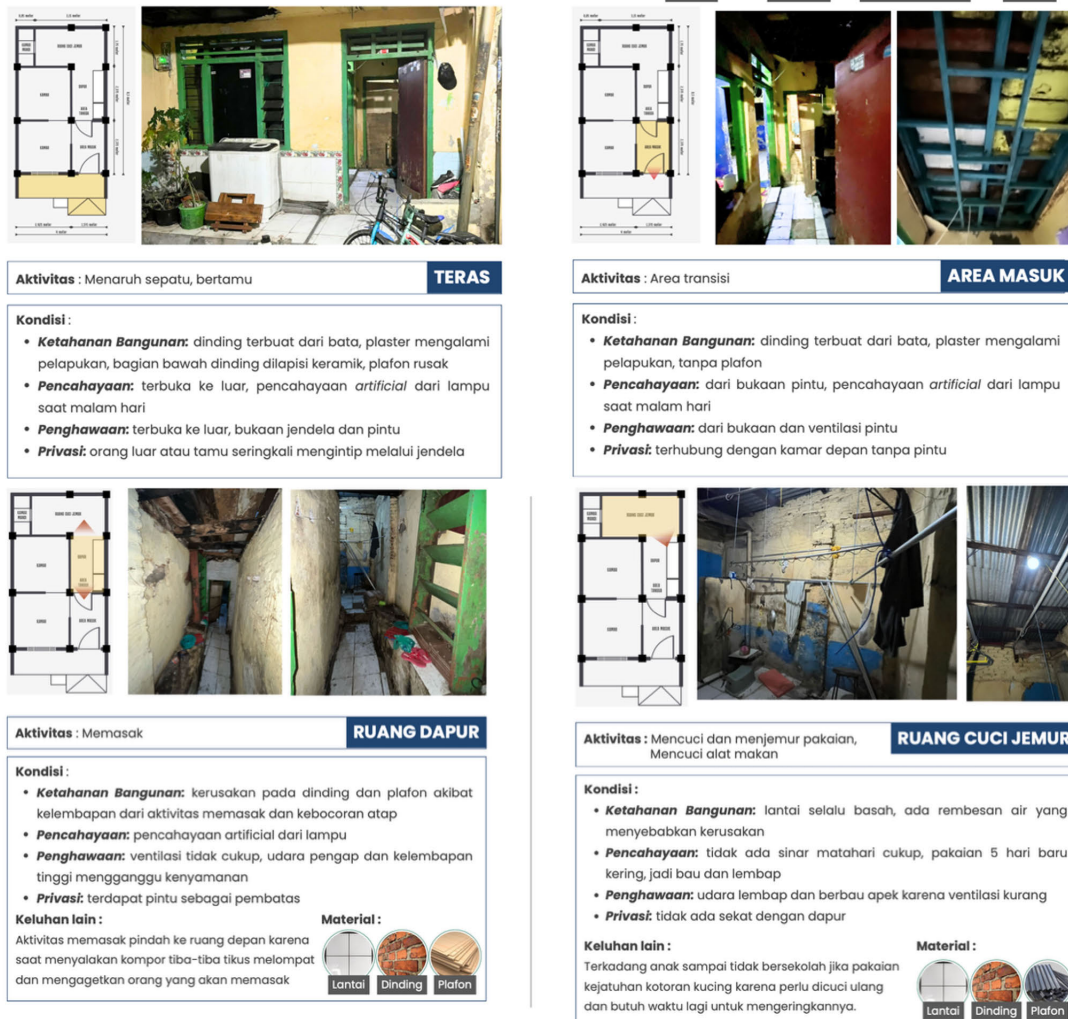
4.2 | Analisis Kondisi Eksisting

Analisis kondisi eksisting dilakukan terhadap seluruh rumah yang disurvei guna memetakan permasalahan utama hunian swadaya di Kelurahan Ngagel. Namun, untuk memberikan gambaran arsitektural yang mendalam dan komprehensif, naskah ini mengambil satu rumah, yaitu Rumah 2 sebagai studi kasus yang paling representatif dalam menggambarkan karakteristik dan permasalahan yang ditemukan. Gambar 5 memperlihatkan proses analisa kondisi eksisting.

Dari analisis kondisi eksisting didapat bahwa sebagian besar rumah kurang memenuhi kelayakan dalam hal kecukupan ruang gerak. Beberapa rumah memiliki ruang gerak kurang dari 9 m² per penghuni. Dalam hal fisik juga banyak ruang-ruang di dalam rumah yang tidak mendapatkan akses cahaya sinar matahari dan penghawaan yang baik sehingga kondisi di dalam rumah cukup lembab. Untuk rumah dengan dua lantai, beberapa hunian menggunakan kayu untuk plat lantai. Namun karena kelembapan yang tinggi, lantai di lantai dua mengalami pelapukan akibat lembab yang disebabkan oleh bocornya atap. Kondisi ini membuat lantai menjadi rapuh. Sehingga dapat dilihat bahwa secara fisik bangunan, banyak bagian yang sudah lapuk dan menjadi potensi bahaya bagi penghuni di dalamnya.

4.3 | Analisis Pembobotan Kelayakan Huni dan Analisis Kebutuhan

Aktifitas selanjutnya adalah analisis kelayakan huni dan analisa kebutuhan penghuni untuk rancangan rumah layak huni. Analisa didasarkan pada kriteria rumah layak huni yaitu ketahanan bangunan, luas bangunan, sanitasi, air minum, pencahayaan, penghawaan, keamanan dan lokasi. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan analisa kelayakan huni dari RTLH yang akan dirancang.



Gambar 5 Proses Analisa Kondisi Eksisting

Setelah analisa kelayakan hunian, selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan dan prioritas kebutuhan rancangan. Berdasarkan wawancara dan observasi pada penghuni rumah, ditemukan berbagai keluhan yang berhubungan langsung dengan ketidaklayakan hunian. Keluhan ini berasal dari tiga kelompok pengguna utama, yaitu kepala keluarga (bapak), ibu, dan anak-anak. Masing-masing pihak memiliki kebutuhan yang berbeda, namun saling berkaitan dalam menciptakan ruang tinggal yang aman, nyaman, dan layak huni.

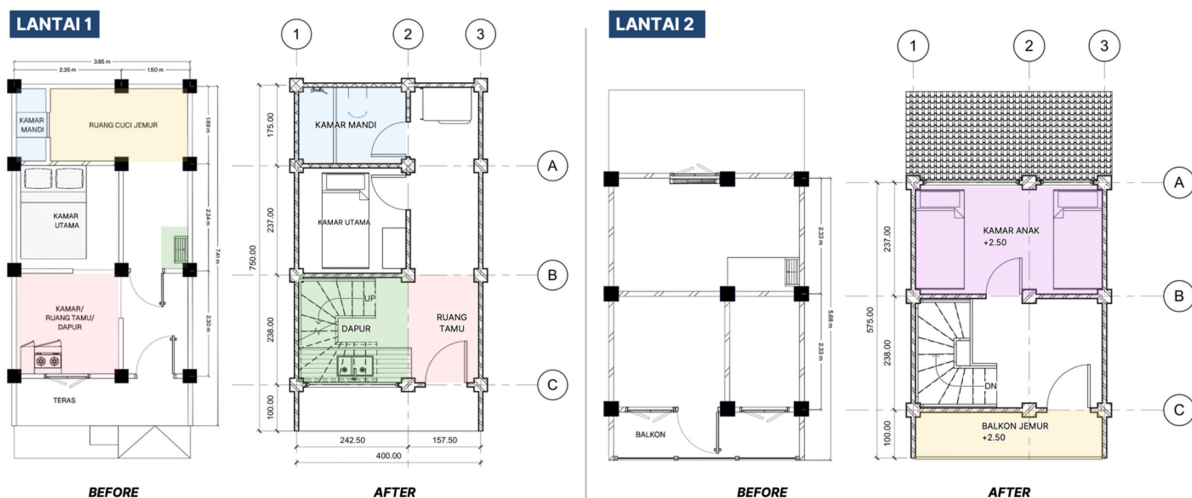
4.4 | Strategi Desain

Mengikuti perbaikan yang diprioritaskan, berikut merupakan proposal denah yang diubah berdasarkan keluhan pengguna. Proposal mengutamakan keamanan, kesehatan, dan hak privasi yang kurang terpenuhi di denah eksisting. Perubahan terbesar adalah perubahan posisi tangga dan dapur di lantai 1, dan pembagian ruang di lantai 2 menjadi kamar anak dan balkon yang digunakan untuk menjemur pakaian.

Prioritas pembangunan akan dibagi ke dalam tiga skala prioritas, mengingat bahwa dana yang diturunkan sangat terbatas. Untuk prioritas pertama, pembangunan lebih diutamakan untuk memperbaiki talang air, mengganti rangka atap kayu yang sudah lapuk menjadi rangka galvalum, mengganti rangka plafon pada lantai 1 dan menambahkan plafond PVC pada lantai 2. Dari prioritas 1 ini diharapkan dapat sedikit mengurangi kelembapan yang berasal dari kebocoran atap dan rembesan air.

Tabel 1 Analisis Kelayakan Huni

No.	Kriteria	Terpenuhi/Tidak	Keterangan
1	Ketahanan bangunan: Komponen struktur dan non-struktur memenuhi kaidah konstruksi, menggunakan bahan bangunan ber-SNI	Tidak	Dinding lapuk, plat lantai 2 lapuk dan tidak kokoh, atap bocor, lantai bolong, plafon rusak
2	Luas bangunan: Luas lantai per orang minimum 7,2 m ²	Tidak	Jika lantai 2 dapat difungsikan dengan layak, luasan lantai bisa memenuhi. Namun karena lt 2 lapuk dan berbahaya sehingga luasan ruangan tidak mencukupi
3	Sanitasi: Sanitasi tersedia di setiap rumah dengan kloset leher angsa, sanitasi tersambung ke Saluran Pembuangan Air Limbah, <i>septic tank</i> disedot minimal 5 tahun 1×	Tidak	Tersedia <i>septic tank</i> , talang air, dan akses air bersih. Kamar mandi tidak tertutup dan terinfestasi kecoak, kaki seribu, dan tikus
4	Air Minum: Air minum tidak berasa/berbau/berwarna, air minum tersedia minimal 12 jam sehari, jarak jangkauan rumah ke sumber air minum maksimal 30 menit, air minum tidak mengandung mikroorganisme dan logam berat	Terpenuhi	Sumber air PDAM
5	Pencahayaan: Pencahayaan alami harus setidaknya 10% dari luas lantai	Tidak	Semua ruangan menggunakan penerangan artifisial (lampu), jendela ada namun tertutupi oleh banyak barang sehingga cahaya tidak bisa secara optimal masuk ke dalam ruangan
6	Penghawaan: Penghawaan harus setidaknya 5% dari luas lantai	Tidak	Bagian belakang rumah tidak ada ventilasi
7	Keamanan: Penghuni hidup secara layak dengan kualitas hidup yang baik, memiliki privasi, keamanan dan perlindungan serta memiliki <i>sense of home</i>	Tidak	Atap bocor membuat tidak nyaman, tidak ada privasi karena jendela mengarah langsung ke kamar tidur
8	Lokasi: Lokasi yang aman dengan lingkungan yang sehat	Tidak	Lingkungan kurang bersih dan banyak hewan masuk melalui lubang ke dalam kamar mandi dan rumah



Gambar 6 Usulan Rancangan

Untuk prioritas kedua, direncanakan untuk mengganti lantai kayu yang sudah lapuk menjadi lantai beton dan dilapisi keramik, menambah railing pipa aluminium, dan mengganti tangga vertikal menjadi tangga spiral. Sedangkan untuk prioritas ketiga akan fokus kepada peningkatan kualitas lingkungan sekitar dan bagaimana tembok-tembok agar tidak dimasuki oleh hewan-hewan serta penambahan privasi untuk keluarga. Gambar 6 memperlihatkan ajuan rancangan dengan memperlihatkan denah kondisi eksisting dan perancangan.

5 | KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan rancangan untuk rumah tidak layak huni di Kelurahan Ngagel, proposal rancangan dengan pembagian skala prioritas diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengimplementasikan pembangunan. Rancangan ini diupayakan untuk bukan hanya meningkatkan kualitas fisik bangunan namun juga meningkatkan kualitas hidup dengan pencahayaan dan penghawaan yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk kegiatan pengabdian selanjutnya:

- Tim sudah membuat perencanaan RAB namun belum sesuai dengan harga satuan pokok konstruksi dari pemerintah kota. Mengingat nantinya pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah, HSPK dari pemerintah akan sangat membantu untuk perencanaan prioritas kebutuhan.
- Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan dan universitas untuk melaksanakan program dandan omah supaya lebih banyak warga yang dapat terbantu untuk meningkatkan kelayakan huniannya.

6 | UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini didukung oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui hibah Pengabdian Kepada Masyarakat Tematik Dana Departemen Nomor Kontrak: 2611/PKS/ITS/2025.

Referensi

1. Tunas D, Peresthu A. The self-help housing in Indonesia: The only option for the poor? Habitat International 2010;.
2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pengantar Rumah Swadaya; 2016.
3. Pemerintah Kota Surabaya. Laporan RP3KP Kota Surabaya; 2023.
4. Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. Profil Kemiskinan di Kota Surabaya Maret 2023; 2023.
5. Badan Pusat Statistik Indonesia. Statistik Penduduk Lanjut Usia; 2023.
6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya; 2018.
7. United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), The right to adequate housing: Fact Sheet No. 21/Rev.1. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights; 2014. <https://unhabitat.org/the-right-to-adequate-housing-fact-sheet-no-21rev1>.
8. United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR), General Comment No. 4: The right to adequate housing (Art. 11 (1) of the Covenant); 1991. <https://www.refworld.org/legal/general/cescr/1991/en/53157>.
9. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2018. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/152275/PermenPUPR29-2018.pdf>.

10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Buku 01: Rumah Layak Huni; 2017. <https://krs.perumahan.pu.go.id/assets/buku/01-BUKU%20RUMAH%20LAYAK%20HUNI.pdf>, [E-book].
11. Edwards L, Torcellini P. A literature review of the effects of natural light on building occupants. National Renewable Energy Laboratory; 2002.
12. Kurmanbekova M, Du J, Sharples S. A review of indoor air quality in social housing across low- and middle-income countries. *Applied Sciences* 2025;15(4):1858.
13. Pusnita I, Wagesri J, Tessa J, Nurwahyuliningsih E, Dewi IM. Sosialisasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah layak huni di Kota Palembang. *Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 2024;6(2).
14. Pemerintah Kota Surabaya, Program Dandan Omah Pemkot Surabaya Wujudkan Senyum Bahagia Warga MBR; 2022. <https://surabaya.go.id/id/berita/68111/program-dandan-omah-pemkot-surabaya-wujudkan-senyum-bahagia-warga-mbr?utm>.

Cara mengutip artikel ini: Utami, A. S. P. R., Setijanti, P., Cahyadini, S., Septanti, D., Setyawan, W., Nasution, T. S. R., Ula, Z. M., Narida, T. S., Oktavia, A. I., (2026), Penerapan Prinsip Rumah Sehat Sebagai Dasar Intervensi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Surabaya, *Sewagati*, 10(4):784–793, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v10i4.9497>.